



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

PSI Menolak Kegiatan Formula E

Palmerah, Warta Kota

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyatakan penolakan keras terhadap penyelenggaraan Formula E pada 2020.

Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Anthony Winza Probowo, menilai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, tak menerapkan prinsip prioritas penganggaran saat mengusulkan penyelenggaraan Formula E. Hal ini disampaikan saat rapat paripurna pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (raperda) APBD 2020, Rabu (4/12).

Menurut PSI, ajang balap mobil listrik tersebut hanya dinikmati oleh masyarakat golongan menengah ke atas. Padahal masih banyak warga pembayar pajak yang kesulitan air bersih mesti ikut menanggung beban iuran pajak yang bakal digunakan untuk penyelenggaraan Formula E.

"Apakah Pak Gubernur tahu bahwa ada warga di Jakarta Utara yang untuk mendapatkan 1 meter kubik air saja harus membeli dengan sampai dengan harga Rp 150.000? Mereka membeli dari tukang air keliling karena belum ada akses air bersih di sana," kata Anthony.

Anthony melanjutkan, Formula E bukanlah program prioritas. Mengingat, hal tersebut tidak terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Peraturan

Gubernur (Pergub) Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah (KSD) tahun 2019. "Bahkan, nilai penyertaan modal daerah (PMD) Formula E lebih besar dibandingkan dengan PMD pembangunan LRT. Padahal, LRT merupakan Program Strategis Nasional (PSN)," ungkapnya.

Politisi muda ini juga menerangkan bahwa tidak ada bukti yang menjelaskan bahwa Formula E akan menumbuhkan ekonomi lokal. Contohnya saat Kota Montela, Kanada menyelenggarakan Formula E menggunakan anggaran pemerintah, mereka justru mengalami kerugian.

"Perlu dicermati bahwa jabatan Pak Gubernur hanya bersisa sampai 2022. Jika Formula E membebani APBD sampai lima tahun ke depan hingga di luar masa jabatan (Anies), apakah ini adil dan patut?" tambahnya.

Pemprov DKI Jakarta pada 2020 menganggarkan dana Rp 396 miliar di Dinas Pemuda dan Olahraga untuk membayar *commitment fee* penyelenggaraan Formula E. Kemudian, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga menganggarkan dana Rp 15 miliar untuk menggelar *pre-event* Formula E.

Selain itu, dana Penyertaan Modal Daerah (PMD) bagi Jakpro selaku pihak yang ditunjuk Pemprov DKI untuk menggelar Formula E di Jakarta sebesar Rp 2,2 triliun. (kompas.com)

KOMENTAR MEREKA

Dorong Pariwisata

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Mohammad Arifin, mendukung penyelenggaraan itu untuk mendorong pariwisata dan menggerakkan perekonomian di Jakarta. Namun, meminta alokasi anggaran penyelenggaraan Formula E dievaluasi. "Fokuskan pada alokasi anggaran yang memang dibutuhkan langsung dengan penyelenggaraan," kata Arifin. (kompas.com)



Libatkan Masyarakat

Ketua Fraksi Partai Demokrat, Desie Christhyana, meminta agar Formula E yang menelan biaya sangat besar tersebut harus lebih banyak melibatkan masyarakat. "Agar efek ekonominya terasa bukan sekadar jadi ajang kalangan menengah ke atas, tapi ada efek domino ekonomi buat semua warga DKI Jakarta," ucap Desie. (kompas.com)



Berdampak Positif

Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Judistira Hermawan, meyakini kegiatan Formula E akan berdampak positif bagi dunia usaha dan industri pariwisata di Jakarta. "Dengan kontrak selama lima tahun ke depan, industri penerbangan, perhotelan, dan kuliner akan mendapatkan keuntungan dan berdampak pada pendapatan daerah," tuturnya. (kompas.com)

